

Dari Kebutuhan Menjadi Ancaman: Ironi Penduduk Pendatang di Kota Balikpapan 1970 – 2013

AKHMAD R. PRATAMA

Alumnus S2 Sejarah UGM
Email: ryntama@gmail.com

Abstract

This article attempts to portray the migration of newcomers into East Kalimantan province during the height of economic growth fostered by the oil and gas and forestry industry. During the decades of 1970-2000, Balikpapan received significant amount of immigration as a result of labor demand. Since 2010, the municipality had started to apply stringent requirements to immigrants to the city. The dilemma of labor demand and the pressure immigration causes to the needs of the urban citizens has turned this into an irony. On the one hand, the presence of laborers was needed for the petroleum and forestry industry, but on the other hand, their presence has resulted in friction with the local population.

Keywords:

Balikpapan;
migration;
population
dynamics

Abstrak

Tulisan ini berusaha untuk memotret migrasi para pendatang di Kalimantan Timur ketika terjadi pertumbuhan ekonomi akibat perkembangan industri migas dan kehutanan. Pada tahun 1970 - 2000 Balikpapan menerima pendatang karena kebutuhan untuk mencukupi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di dalam industri migas dan kehutanan, namun setelah tahun 2010 Pemerintah Balikpapan mulai menerapkan syarat yang cukup ketat bagi para pendatang untuk dapat menjadi warga kota. Dilema antara kebutuhan tenaga kerja dan kebutuhan sebagai warga di Balikpapan inilah yang kemudian menjadikan sebuah ironi. Di satu sisi, kehadiran para tenaga kerja dibutuhkan untuk memperkuat dunia industri migas dan kehutanan, tetapi di sisi yang lain kehadiran para migran juga menjadi permasalahan kependudukan yang penting.

Kata Kunci:

Balikpapan;
dinamika;
migrasi;
penduduk

Pengantar

Balikpapan merupakan salah satu kota di Kalimantan Timur yang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat pesat sejak tahun 1970an, yaitu sejak meningkatnya permintaan dunia terhadap komoditas kayu di Kalimantan Timur. Pada awalnya Balikpapan merupakan wilayah kesultanan Kutai yang tidak ramai. Akan tetapi, setelah ditemukannya minyak bumi pada masa kolonial, Balikpapan kemudian menjelma menjadi sebuah kota industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Pada tahun 1970an terjadi perkembangan industri kayu, sehingga kebutuhan tenaga kerja pun meningkat tajam. Diperkirakan sejak tahun 1970an terjadi kenaikan jumlah penduduk Kalimantan Timur sebesar 7% (Wood, *Geographical Review*, Vol. 76, No. 2, 1986:149). Setidaknya hingga tahun 1990an, Balikpapan masih menarik perhatian bagi para pendatang untuk mencari kerja, karena terbukanya kesempatan kerja, sementara tenaga ahli belum memadai. Namun, kondisi tersebut perlahan berubah ketika pada awal tahun 2000an terjadi krisis ekonomi 1998 yang berdampak pada semakin berkurangnya kesempatan bekerja di Balikpapan. Akibatnya timbullah berbagai permasalahan sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini fokus pada sebuah fenomena yang sangat menarik, yaitu meningkatnya kebutuhan tenaga kerja untuk industri sejak masa kolonial tetapi kemudian muncul permasalahan baru yang tidak dapat dielakkan pada tahun 2000an. Fenomena ini merupakan sebuah ironi, karena pertumbuhan Balikpapan sebagai sebuah kota, tidak dapat dipisahkan dari peran pendatang yang melakukan migrasi, namun pada akhirnya Balikpapan mulai melakukan pembatasan terhadap jumlah pendatang yang akan mencari penghidupan di kota tersebut.

Tulisan ini berusaha menggunakan pendekatan historis dan antropologis untuk merekonstruksikan fakta, dengan asumsi bahwa ketika terjadi arus pendatang yang menetap di suatu kota, maka di kota tersebut akan terjadi perubahan di berbagai bidang, mulai dari sosial, ekonomi, politik, hingga budaya. Penggunaan pendekatan historis dan antropologis mutlak diperlukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi. Selain itu, tulisan ini juga memanfaatkan berbagai laporan resmi, pemberitaan surat kabar, dan wawancara mendalam dengan para informan, sehingga mampu memberikan gambaran tentang perubahan yang terjadi pada kaum migran di Balikpapan.

Pertumbuhan Industri dan Migrasi

Pertumbuhan Balikpapan sebagai sebuah kota tidak dapat dilepaskan dari kehadiran para pendatang dalam merespons industri minyak bumi pada masa kolonial. Selanjutnya pada tahun 1970an terjadi timber boom, yaitu munculnya industri kayu yang menjadi magnet semakin besarnya kehadiran para pendatang. Kesempatan ini segera disambut oleh para imigran,

khususnya dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, untuk datang ke Balikpapan. Tak heran jika data pada tahun 2000an menunjukkan bahwa hampir 30% penduduk Balikpapan adalah etnis Jawa. Aliran arus pendatang untuk mencari lapangan pekerjaan terus membajiri Balikpapan, denyut perekonomian pun berjalan seiring dengan meningkatnya jumlah pendatang. Namun sayang sejak awal tahun 2000an lapangan pekerjaan di Balikpapan semakin menyusut. Hal ini membawa dampak permasalahan baru bagi Balikpapan, yaitu berupa munculnya kemacetan lalu lintas, kemiskinan, pemukiman liar, kerusakan lingkungan, dan kriminalitas.

Secara geografis, Balikpapan merupakan sebuah kota dengan tingkat perekonomian yang baik, yaitu yang bertumpu pada sektor (minyak dan gas), perdagangan, serta jasa. Letak industri di kota ini terpusat pada dua kelompok areal yang cukup dominan dalam konteks ekonomi kota, yaitu kawasan industri kilang minyak milik Pertamina dengan luas areal sekitar 250 ha. Keberadaan kilang ini sangat strategis karena merupakan bagian dari cikal bakal pertumbuhan kota sekaligus memberikan jiwa pada fungsi utama kota sebagai kota industri. Selain itu, kawasan industri ini juga didukung oleh pengelolaan tambang-migas, berupa pengelompokan pabrik, tempat usaha, bengkel, dan distributor yang terletak di sepanjang garis pantai kota tersebut. Berkembangnya industri tersebut menyebabkan Balikpapan terus dibanjiri oleh para pendatang dari berbagai daerah. Pemerintah Kota kemudian memberlakukan operasi kependudukan berupa operasi Kartu Tanda Penduduk, terutama dari etnis pendatang yang sudah lama menetap di Balikpapan, yakni yang berasal dari Jawa, Madura, Banjar, Bugis, Makassar, dan Gorontalo. Selain dibanjiri oleh banyak pendatang, berbagai perusahaan asing dan lokal pun berinvestasi di Balikpapan. Banyak Perusahaan yang membuka kantor cabang mereka di Balikpapan, walaupun areal operasinya memang terletak di luar kota Balikpapan, dikarenakan dari sisi infrastruktur, keamanan, dan transportasi Balikpapan lebih mudah untuk dicapai.

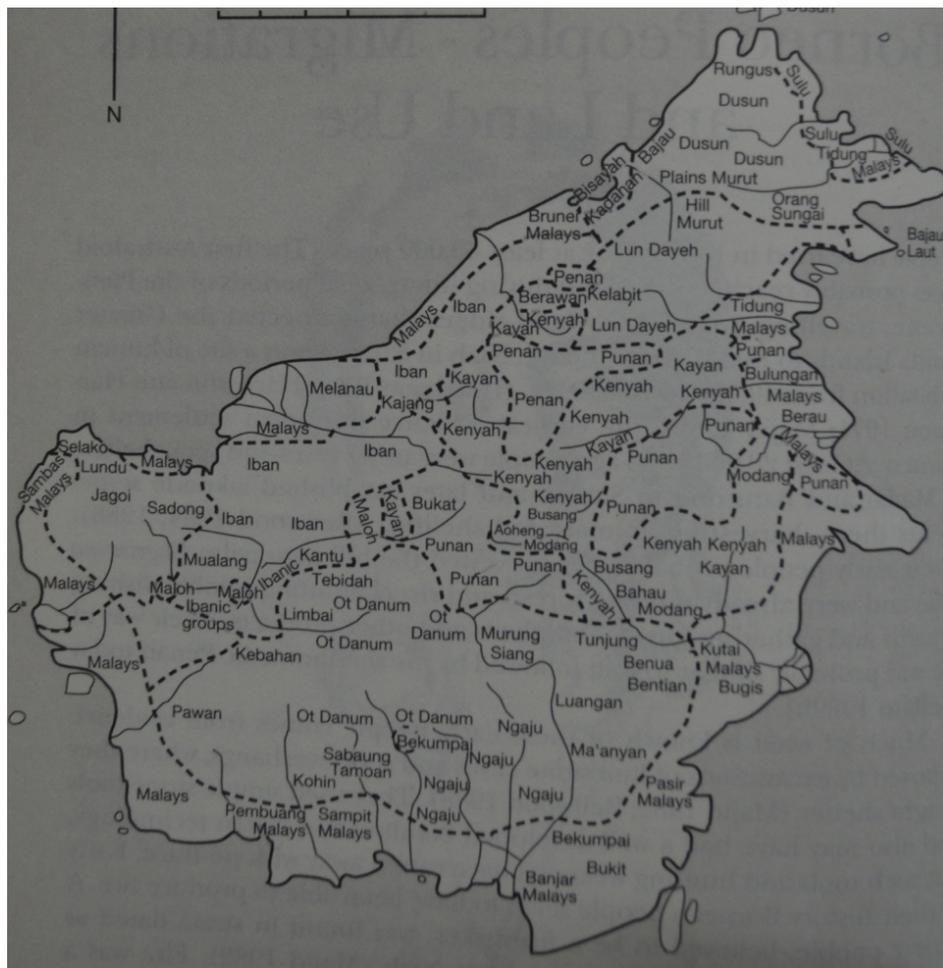
Etnis-Etnis di Balikpapan: Siapakah Penduduk Asli Balikpapan?

Pembicaraan mengenai akar historis siapa penduduk asli kota Balikpapan tidak dapat dilepaskan dari Kesultanan Kutai, kerana secara administratif sejak awal tahun 1870 Balikpapan masuk ke dalam wilayah kesultanan Kutai. Sumber lokal menyebutkan bahwa Kutai lama hancur pada abad ke XIII akibat serangan dari para perompak yang berasal dari Filipina Selatan (Lapian, 2009:117–164).¹ Sumber lokal lain menyebutkan tentang persentuhan Kutai dengan masyarakat Cina. Di dalam cerita “Aji Puteri Bidara Putih” disebutkan

1) AB Lapian menjelaskan penyebaran bajak Laut dari Filipina Selatan yang pada masa itu kerap beroperasi di perairan selat Makassar pada abad XVII –XIX, dan terkadang juga beroperasi hingga pesisir pantai timur Kalimantan.

bahwa persentuhan Kutai dengan masyarakat Cina terjadi antara abad XV hingga abad XVII. Dalam cerita tersebut dikisahkan tentang seorang putri dari Kerajaan Kutai yang dilamar oleh seorang pangeran dari Cina. Namun pinangan tersebut ditolak dan pada akhirnya terjadi peperangan antara Kutai dengan Orang-orang Cina. Dalam cerita tersebut dikisahkan juga bahwa pangeran Cina itu membawa banyak barang-barang berharga, seperti porselin, keramik, dan kain sutra (Noor,1981:51 – 55). Apa yang dibawa oleh orang-orang Cina tersebut merupakan komoditas unggulan dinasti Ming di Cina pada awal abad XVI – XVII dan bukti artefak dari keramik-keramik tersebut masih tersimpan di Museum Kutai di Tenggarong. Besar kemungkinan bahwa memang pada masa itu Kerajaan Kutai sudah merintis hubungan dagang dengan Cina.

Sementara itu, di dalam tulisan Eric Tagliacozzo yang berjudul *Onto the coasts and into the forest: Remifications of The China Trade on The Ecological History of Northwest Borneo, 900 – 1900 CE* disebutkan bahwa sebenarnya interaksi antara Cina dengan orang-orang di Kalimantan khususnya Melayu



Figur 1. Persebaran Etnis-etnis di Pulau Kalimantan. Sumber: Kathy McKinnon, dkk. *Ecology of Kalimantan Indonesian Borneo*. (Singapura: Periplus, 1996).

telah terjadi antara tahun 900 – 1900, dari masa Dinasti Sung hingga Dinasti Tang dalam periode tersebut terjadi kenaikan kebutuhan Cina terhadap hasil produksi hutan yang dihasilkan dari Kalimantan (Wadley, 2005:25 – 29). Produk-produk yang berasal dari lingkungan, seperti sarang burung, teripang, rotan, dan kamper menjadi sebuah komoditas yang sangat penting bagi para pedagang asing. Hal ini pada akhirnya menjadi pemicu terjadinya interaksi perdagangan yang semakin intens. Hasilnya banyak pemukiman semi nomaden yang ada di pesisir Kalimantan yang mengadopsi kebudayaan etnis lainnya untuk keperluan perdagangan dengan Cina.

Sementara itu, Han Knappen membagi orang-orang yang tinggal di Kalimantan Tenggara menjadi dua kelompok, yaitu Melayu dan Dayak yang kemudian dapat dibagi lagi menjadi puluhan suku. Pembagian kedua suku tersebut didasarkan pada identitas bahasa dan agama yang dianut. Dimana orang Melayu selalu diidentikkan dengan Islam dan Dayak bukan Islam serta tidak berbahasa Melayu. Akan tetapi kondisi tersebut seringkali juga tersamar, karena ada pula orang Melayu yang non-Islam dan orang Dayak yang Islam. Ada kemungkinan peradaban bukan Dayak, yaitu Melayu datang pada awal abad XIV yang berasal dari Sumatra. Dalam kitab *Negarakertagama* dijelaskan bahwa orang-orang di hulu Sungai Kapuas dan Barito sudah membayar upeti kepada raja di Jawa, kedua suku yang tinggal pada masa itu ialah orang-orang Dayak, sehingga Knappen juga mempercayai bahwa kebudayaan Hindu berasal dari Jawa dan mempengaruhi kebudayaan Dayak di sekitar sungai (Knappen, 2001:61 – 65).

Selain orang Melayu, terdapat juga orang-orang Bugis di Kalimantan. Menurut Lindblad, orang-orang Bugis sudah datang ke Kalimantan pada abad XVII dan sudah mendirikan pemukiman permanen di sepanjang pantai timur Kalimantan. Pada abad XIX orang-orang Bugis telah berhasil mengontrol perdagangan di sebagian besar pantai timur, mereka bertindak sebagai penyuplai barang-barang impor yang sangat dibutuhkan di Kalimantan. Orang-orang Bugis juga terbiasa membawa komoditas-komoditas yang berasal dari hutan, seperti sarang burung, kulit ular dan getah resin yang diperjualbelikan di pasar-pasar internasional. Kapal-kapal orang Bugis berlayar dari Makassar, Surabaya, Singapura, hingga ke Johor. Orang-orang Bugis mendapat keistimewaan bahwa secara yudisial mereka dianggap sebagai warga negara Kesultanan Kutai. Orang-orang Bugis juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan orang-orang dari Kesultanan Sulu, sehingga mereka sangat leluasa berdagang di kawasan Selat Makassar. Pada tahun 1827 sekitar 300 perahu orang Bugis datang di Samarinda. Orang-orang Bugis dan Banjar telah lebih dulu mendiami pesisir-pesisir kota Balikpapan, kebanyakan mata pencaharian mereka sebagai nelayan dan pedagang perantara (Lindblad, 1988: 11).

Jika dikembalikan ke akar historis sebenarnya Balikpapan merupakan

tempat tujuan dari berbagai macam etnis yang melakukan proses imigrasi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Balikpapan yang terletak di wilayah pesisir Kalimantan menjadi tempat persinggungan beberapa etnis dari zaman kolonial, sehingga komposisi etnis yang tinggal di Balikpapan sangatlah beragam dan kompleks. Namun akhir-akhir ini terdapat sebuah gerakan adat Kutai dan Penduduk Asli Kalimantan untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih baik di kota Balikpapan. Sebagai contoh Bandara Balikpapan yang baru saja diresmikan, mendadak oleh sekelompok orang yang berafiliasi dengan gerakan adat Kutai memaksa pemkot Balikpapan untuk mengubah nama bandara tersebut dari bandara Sepinggian menjadi bandara Sultan Aji Muhammad. Penggantian nama bandara tersebut menggunakan nama yang berasal dari seorang Sultan Kutai yang dianggap berjasa memajukan Balikpapan pada masa kolonial (Kompas, 5 Februari 2014). Fenomena yang menarik dimana gerakan adat dan pencarian identitas “budaya” di Balikpapan mulai bermunculan ketika wilayah ini mulai berubah menjadi kota metropolis yang ramai.

Akar Historis Masuknya Pendatang di Balikpapan

Sebelum ditemukannya minyak bumi serta batu bara, Balikpapan merupakan perkampungan nelayan kecil. Jumlah penduduk Balikpapan pada tahun 1915 diperkirakan sekitar 6000 orang pribumi dan campuran yang terdiri dari etnis Tionghoa dan etnis Asia lainnya, selain itu terdapat juga sekitar 100 orang Eropa yang telah mendiami Balikpapan (Lindblad, 1988: 11). Jumlah penduduk pada tahun 1930 mencapai 29.848 jiwa, dengan rincian jumlah populasi orang Eropa sebanyak 988 jiwa, orang-orang tionghoa sebanyak 4.327 jiwa, serta orang-orang timur asing sebanyak 1.117 Jiwa, dan jumlah penduduk pribumi sebanyak 23.411 jiwa (*Indisch Verslag* 1936). Dengan rata-rata jumlah pertumbuhan penduduk pertahunnya mencapai 11,28%. Pembangunan industri minyak di Balikpapan yang semakin pesat yang juga didukung dengan pembangunan infrastruktur pendukungnya membuat arus migrasi ke Balikpapan meningkat setiap tahunnya. Para pendatang biasanya mencoba untuk mengadu nasib dengan berdagang atau bekerja menjadi buruh minyak (Humas Kota Balikpapan, 1987:45).

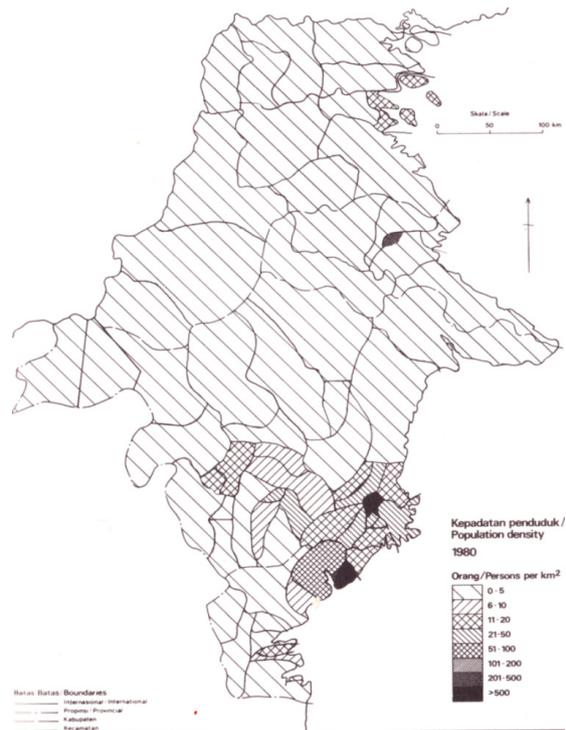
Pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur tergolong sangat lambat dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Namun, sejak tahun 1960 hingga tahun 1980 pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur meningkat dengan sangat pesat, terutama di beberapa kota besar, yaitu Balikpapan, Samarinda, dan Kutai. Dalam kurun waktu 20 tahun jumlah penduduk di Balikpapan dan Samarinda meningkat lebih dari tiga kali lipat (lihat tabel). Kebanyakan penambahan jumlah penduduk bukan disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi, namun jumlah migrasi yang berasal dari luar Kalimantan Timur.

Berdasarkan identitas etnis, penduduk yang bermukim di Kalimantan Timur sangat beragam. Pembagian identitas masyarakat Kalimantan Timur sebagian besar didasarkan atas suku bangsa maupun agama. Terdapat suku-suku asli dan juga terdapat juga suku-suku pendatang. Sebagian besar masyarakat di pesisir Kalimantan Timur merupakan penganut agama Islam, dan sebagian penduduk menganut agama Kristen, Hindu, Budha serta penganut agama asli suku pribumi yang juga disebut *Kahuringan*. Terdapat berbagai macam kelompok etnik di Kalimantan Timur, diantaranya Dayak, Banjar, Bugis, Kutai, dan Jawa. Kelima etnik ini menempati jumlah populasi terbesar, dan tersebar di beberapa kota dan kabupaten di Kalimantan Timur.

Latar belakang Historis yang berbeda dan interaksi yang dilakukan sejak masa kolonial di antara kelompok-kelompok etnik tersebut pada akhirnya mengantarkan kelompok etnik tertentu menjadi lebih dominan daripada kelompok etnik lainnya. Pada akhirnya dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik antar etnik. Maka dalam beberapa kasus akan memunculkan kelompok-kelompok atau lapisan-lapisan tertentu yang secara sosial, politik, dan ekonomi jauh mengungguli anggota lain dari kelompok etniknya sendiri, atau bahkan juga bisa mengungguli kedudukan etnis-etnis pribumi. Bahkan lambat laun rivalitas politik di Kalimantan semakin meruncing dengan penguatan identitas etnis yang tentu saja juga mengakomodasi kepentingan yang berbeda-beda (Bammelen dan Remco Raben, 2011:161 – 194).

Banyak orang Bugis yang menjadi elit-elit politik di beberapa kota besar di Kalimantan Timur, seperti Balikpapan dan Samarinda. Selain itu orang-orang Bugis juga sebgaiian besar menguasai sektor perdagangan di beberapa kota di Kalimantan Timur. Etnis Banjar juga mencoba peruntungan mereka untuk menguasai sektor perdagangan dan ekonomi. Kebanyakan orang-orang Bugis dan Banjar banyak mendiami daerah pesisir Kalimantan Timur.

Sementara itu, hanya sebagian kecil orang-orang Jawa yang mencoba peruntungan mereka di sektor perdagangan dan wirausaha, kebanyakan orang-orang Jawa mengisi tenaga kerja formal seperti birokrat dan sektor-sektor tenaga kerja informal lainnya seperti buruh. Sedangkan orang-orang Kutai mulai mengalami penurunan legitimasi ketika kesultanan Kutai pada



Figur 2. Kepadatan Penduduk Kalimantan Timur Pada Tahun 1980. Sumber: Zimmermann, Gerd R. *Kalimantan Timur: Petunjuk Statistik 1980*. Tempat Terbit, Penerbit dan Tahun Terbit Tidak Diketahui. [Proyek Pembangunan Daerah Transmigrasi Kalimantan Timur]

tahun 1960an tanah dan kekayaannya diambil oleh negara (James Davidson *et al*, 2010:165 – 186).

Tahun 1961 jumlah penduduk Balikpapan berjumlah 91.706 orang, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 3,81% per tahun. Satu dekade setelahnya tepatnya pada tahun 1970 jumlah penduduk bertambah menjadi 130.306 orang. Kenaikan jumlah penduduk yang cukup tinggi setelah tahun 1960an disebabkan adanya pembukaan industri-industri di bidang kehutanan yang menyerap banyak buruh. Industri di bidang kehutanan ini menerima tenaga kerja cukup besar, terutama di bidang pekerjaan kasar seperti menebang pohon, merintis jalan di hutan, menguliti pohon dan lain sejenisnya. Pekerjaan ini banyak digemari pada masa itu karena tidak memerlukan keahlian khusus.

Kalimantan sudah dilirik sebagai salah satu kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama pada tahun 1970an – 1990an. Pemerintah Orde Baru memandang bahwa Kalimantan memiliki potensi yang sangat besar untuk usaha pertanian dan mampu menampung beban kelebihan penduduk yang ada di pulau Jawa dengan melahirkan program transmigrasi.²

Tabel 1. Penempatan Transmigran di Kalimantan Timur Antara Tahun 1954 – 1981

No	Kota/Kabupaten	Tahun				Total
		1954 -1968	1969 1974	1974 -1979	1979 -1981	
1	Samarinda	5194	4305	1373	NA	10872
2	Balikpapan	5352	591	11131	NA	17074
3	Pasir	1765	NA	4220	NA	5985
4	Kutai	8534	5651	8773	2235	25193
5	Bulungan	NA	425	481	NA	906

Sumber: Diolah dari Zimmermann, Gerd R. *Kalimantan Timur: Petunjuk Statistik 1980*. Tempat Terbit, Penerbit dan Tahun Terbit Tidak Diketahui. [Proyek Pembangunan Daerah Transmigrasi Kalimantan Timur]

Program transmigrasi yang sudah dilaksanakan dari zaman Soekarno dan ditingkatkan pelaksanaannya oleh rezim Orde Baru berhasil meningkatkan keberadaan etnis Jawa di beberapa kota dan kabupaten di Kalimantan Timur. Di dua kota besar di Kalimantan Timur, yakni Balikpapan dan Samarinda, etnis Jawa biasanya bermata pencaharian sebagai Pegawai negeri sipil dan pedagang. Sementara di beberapa kabupaten seperti Kutai

2) Pada awalnya pemerintah Orde Baru memandang Kalimantan memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan usaha pertanian (padi basah) seperti yang ada di pulau Jawa, akibatnya didatangkan banyak transmigran dari Jawa untuk memulai usaha pertanian sesuai dengan Jawa. Kalimantan memiliki iklim yang sangat baik untuk melakukan pertanian, tidak ada musim kering, matahari sepanjang tahun. Namun berdasarkan kajian faktual beberapa agronomis menyatakan bahwa tanah di Kalimantan sangat miskin akan kandungan zat hara, sangat rentan, dan sangat sulit untuk diolah menjadi lahan pertanian seperti di Jawa.

dan Pasir, etnis Jawa bermata pencaharian sebagai petani, dan peladang, dan pedagang.

Hingga tahun 1967 ekspor kayu dari Kalimantan Timur tidaklah begitu signifikan, namun setelah masuknya investasi asing yang didukung oleh Undang-Undang (UU) investasi asing No 1 tahun 1967, maka eksploitasi terhadap hasil hutan berupa komoditas kayu dan non kayu semakin meningkat, implikasinya ialah adanya perubahan sosial yang terjadi di Kalimantan Timur dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan. Selain itu masuknya modal asing juga berdampak pada hubungan antara penebang pohon dengan pembeli kayu serta bagaimana terbukanya akses antara pembeli dengan penduduk desa yang menguasai komoditas hutan tersebut. Pada awalnya penebangan hutan dilakukan dengan cara manual, namun setelah tahun 1968 terjadi mekanisasi besar-besaran dalam industri hutan di Kalimantan Timur. Seperti yang terjadi di Kutai Kartanegara dan Samarinda, luas hutan di kedua kota tersebut pada tahun 1970 seluas lebih dari 7,5 juta hektar, namun pada tahun 1969 jumlah pengusaha kayu di kabupaten Kutai bertambah sangat pesat hingga menjadi 272 perusahaan dengan luas area konsesi kayu seluas 1 juta hektar dengan produksi pada akhir tahun 1969 lebih dari 1 juta kubik kayu gelondongan. Luas daerah konsesi hutan akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan dan meningkatnya kebutuhan akan kayu (Anwar Sotoen, 1979:301).

Tabel 2. Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Timur 1970 - 1985

Tahun	Jumlah Penduduk
1971	707.925
1976	937.702
1978	1.046.686
1979	1.068.861
1980	1.177.045
1981	1.212.803
1982	1.245.625
1983	1.302.864
1984	1.355.741
1985	1.408.708

Sumber: kantor Statistik Kalimantan Timur 1986 dikutip dari Kalimantan Timur dalam angka 1985.

Pemerintah pusat dan daerah sangat mudah memberikan izin pemberian hak penguasaan hutan. Pembeli dari Jepang datang langsung ke kedua kota terbesar di Kalimantan Timur yaitu Balikpapan dan Samarinda dan mereka menginvestasikan dana mereka untuk usaha kehutanan kepada

masyarakat lokal. Akibatnya banyak arus migrasi yang terjadi di Kalimantan Timur, karena industri-industri kehutanan tersebut banyak membutuhkan tenaga kerja dan sejak tahun 1970 terjadi booming kayu hingga akhir tahun 1980an (Thee Kian Wie, 2005:22 – 35).

Tabel 3. Pertumbuhan Populasi di 6 Kotamadya dan Kabupaten di Kalimantan Timur dari Tahun 1960 – 1980

No	Kabupaten/Kotamadya	Tahun			
		1961	1971	1977	1980
1	Balikpapan	91.706	137.340	238.141	279.852
2	Samarinda	69.712	137.918	190.393	264.012
3	Kutai	220.256	241.412	315.209	368.294
4	Berau	28.256	31.954	38.726	45.602
5	Bulungan	95.685	119.199	158.380	176.302
6	Pasir	44.967	57.192	67.719	80.542

Sumber: Diolah dari Zimmermann, Gerd R. *Kalimantan Timur: Petunjuk Statistik 1980*. Tempat Terbit, Penerbit dan Tahun Terbit Tidak Diketahui. [Proyek Pembangunan Daerah Transmigrasi Kalimantan Timur] dan Monografi Daerah Kalimantan Timur Tahun 1969.

Adanya booming kayu menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk di kedua kota besar di Kalimantan, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Antara tahun 1979 hingga tahun 1985 di Balikpapan timbul usaha industri kayu dan plywood yang berlokasi di Balikpapan seberang (sekarang telah mekar menjadi kabupaten Penajam Paser Utara). Berdasarkan peta tata guna hutan tahun 1979 luas hutan di Balikpapan sebesar lebih dari 350 ribu hektar, yang terdiri dari 180 ribu hektar hutan produksi, 11 ribu hektar hutan konservasi dan kemudian hutan produksi yang dapat di konversi sebanyak 170 ribu hektar (Humas Kota Balikpapan, 1987:94).

Sumber perekonomian Balikpapan berdasarkan data pendapatan regional Balikpapan tahun 1984 - 1988 berasal dari sektor perdagangan, Restoran, dan Hotel yang selama lima tahun memberi sumbangsih terhadap produk domestik regional bruto sebesar 40%. Selain dari sektor pertanian dan kehutanan memberikan kontribusi sebesar 10%. Industri pertambangan migas (bukan batubara) memberikan kontribusi rata-rata sekitar 15% selama 5 tahun. Industri pengilangan Minyak juga memberikan kontribusi rata-rata sebesar 15% per tahun, antara tahun 1984 – 1988 (Bappeda Balikpapan, 1989:41). Adanya pendapatan terbesar produk domestik bruto Balikpapan yang berasal dari sektor perdagangan semakin memberikan peluang bagi para pendatang untuk melakukan migrasi ke Balikpapan karena pertimbangan potensi pasar dan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan industri ekstraksi sumber daya alam, yang semakin tidak menentu pada awal dekade 1990 akibat mulai berkurangnya suplai kayu gelondongan.

Munculnya Masalah dan “Penolakan” Balikpapan terhadap Pendatang

Dengan semakin tumbuhnya perekonomian terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah setelah rezim Orde Baru runtuh, Balikpapan terus menerus menjadi tujuan bagi para pendatang dari berbagai daerah, sehingga pemerintah kota memberlakukan operasi kependudukan berupa Operasi KTP di pintu masuk kota, jalan raya, pemukiman, bandara, serta pelabuhan (Balikpapan Post, 19 Agustus 2013). Penduduk terutama dari etnis pendatang yang sudah lama menetap di Balikpapan yakni berasal dari etnis Banjar, Bugis, Makassar, Jawa Timur kemudian pendatang lain yang di antaranya beretnis Manado, Gorontalo, Madura, Jawa, Sunda dan etnis-etnis lainnya.

Pada akhir Juni tahun 2013, jumlah penduduk Balikpapan mencapai 656.417 jiwa dengan jumlah pendatang selama tahun 2012 sebanyak 21.486 jiwa yang merupakan jumlah tertinggi selama tiga tahun terakhir (Balikpapan Post, 8 Agustus 2013). Jumlah pendatang tersebut mampu melampaui jumlah pendatang yang masuk di Singapura pada tahun yang sama yakni sebanyak 20.693 jiwa. Antara tahun 2003 hingga 2012, jumlah pendatang tercatat 170 ribu jiwa lebih, sebagian besar dari pendatang tersebut memenuhi persyaratan dan kemudian menjadi warga tetap, sedangkan sisanya dipulangkan atau pindah sendiri. Peningkatan jumlah penduduk terjadi akibat tingginya arus migrasi pendatang serta pertambahan alamiah (kelahiran), sehingga Balikpapan mulai tahun 2005 hingga saat ini menjadi kota terpadat penduduk di Kaltim (Pemprov Kalimantan Timur, 2010:30).

Suku-suku yang membentuk masyarakat/orang Balikpapan berdasarkan sensus yang dilakukan pada tahun 2010, yaitu Suku Paser 8,77%, Suku Kutai 10,43%, Suku Banjar 12,19%, Suku Bugis 14,44%, Suku Jawa 29,76%, Rumpun Tionghoa 16,76%, Suku Minahasa 6,81%, Suku Batak 3,21%, Suku Aceh 2,08%, Suku Gayo 1,08%, Suku Gorontalo 0,06%. Pertumbuhan pendatang dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kelahiran. Jumlah pendatang yang tinggi tidak dibarengi dengan kompetensi yang memadai dan tidak sesuai dengan sektor yang dibutuhkan. Tercatat sekitar 9 ribuan pendatang dengan pendidikan lulusan SD sempat mencari kerja di kota ini, namun tidak ada permintaan tenaga kerja dari lulusan SD. Daya tampung Balikpapan terhadap tenaga kerja sudah sangat minim, jumlah pencari kerja selalu jauh lebih tinggi dibandingkan permintaan tenaga kerja. Jumlah pendatang yang mencari kerja melonjak drastis, sementara permintaan tenaga kerja yang rendah hanya mengakibatkan peningkatan angka pengangguran. Tingginya angka pengangguran dan pekerja di sektor informal menjadi penyebab masalah penataan kota, pemukiman tak layak, kekumuhan, dan peningkatan kriminalitas (Kaltim Post, 15 Agustus 2013). Pemerintah kota pun telah membuat peraturan kota yang mewajibkan seluruh pendatang untuk membayar dana jaminan serta memenuhi beberapa persyaratan hingga

setengah tahun. Setiap penduduk juga diwajibkan untuk membawa KTP Balikpapan dalam perjalanan kemanapun.³

Berdasarkan asalnya, pendatang berasal dari pulau-pulau di sekitar seperti Jawa, Madura, dan Sulawesi. Jumlah pendatang paling banyak berasal dari Jawa yakni sebanyak 30%, kemudian diikuti dengan Banjar dan Bugis masing-masing sebanyak 20%, Toraja sebanyak 11%, Madura sebanyak 8%, Buton sebanyak 7% dan Betawi sebanyak 4%. Sedangkan untuk tingkat pendidikan pendatang didominasi oleh lulusan SLTA sebanyak 36%, diikuti lulusan SD sebanyak 25%, tidak tamat SD sebanyak 23%, lulusan SMP sebanyak 12% dan perguruan tinggi hanya 4%. Alasan pendatang masuk ke Balikpapan beragam, paling banyak karena mencari pekerjaan (48%), kemudian karena pindah kerja (33%) dan karena ikut keluarga atau suami sebanyak 19%. Kesadaran pendatang dalam membuang sampah di Balikpapan bervariasi, ada yang membuangnya tepat di TPS hingga membuang bebas di sungai. Sekitar 50% pendatang membuang sampah di TPS, kemudian sebanyak 35% pendatang pengelolaan sampahnya dipungut oleh petugas, 11% pendatang membakar sampahnya dan sebanyak 4% membuangnya langsung ke sungai. Dengan pertumbuhan pendatang yang sangat tinggi, pada tahun 2015 jumlah penduduk diprediksi meningkat menjadi 825.275 jiwa yang mengakibatkan 5,15% (42.502 jiwa) penduduk Balikpapan saat itu tidak dapat menikmati air bersih. Jumlah penduduk pada tahun 2033 diprediksi mencapai angka 1.102.366 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 2.190 jiwa/km² (Bappeda Balikpapan, 2012:25).

Jumlah penduduk miskin cenderung meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari BPS Balikpapan, pada tahun 2009 terhitung 18.440 jiwa penduduk Balikpapan merupakan penduduk miskin, kemudian di tahun 2010 meningkat empat ribu jiwa menjadi 22.850 jiwa dan pada tahun 2011 terjadi penurunan sedikit namun belum juga berkurang dari jumlah tahun 2009 yakni sebanyak 19.820 jiwa (Kaltim Post, 11 Januari 2013). Angka kriminalitas di tahun 2012 mengalami peningkatan. Selama tahun 2012, terdapat 1.179 laporan kejahatan diterima oleh Polres Balikpapan sedangkan di tahun 2011 terdapat 1.168 laporan. Kasus kejahatan yang paling banyak dilaporkan yaitu pencurian kendaraan sebanyak 433 kasus, disusul pencurian dengan pemberatan (curat) sebanyak 390 kasus, penganiayaan sebanyak 154 kasus, narkoba sebanyak 108 kasus, perampokan sebanyak 82 kasus dan pembunuhan sebanyak 12 kasus. Jenis kasus kejahatan yang meningkat tajam di tahun 2012 yakni kasus narkoba yang mana pada tahun 2011 hanya sebanyak 10 kasus, kemudian meningkat sepuluh kali lipat menjadi 108 kasus (Kaltim Post, 2 Januari 2013).

Degradasi lingkungan juga terjadi di berbagai kawasan hutan lindung

3) Peraturan kependudukan yang ada di Balikpapan dan baru diterapkan pada tahun 2012 mewajibkan seluruh warga kota Balikpapan untuk membawa KTP, karena terkadang pemerintah kota Balikpapan kerap mengadakan razia KTP secara acak. Bagi yang kepadatan tidak membawa KTP atau tidak dapat membuktikan dirinya sebagai warga kota maka akan diberikan sanksi administratif hingga diamankan di kantor satpol PP.



Figur 3. Kepadatan Kota Balikpapan Pada tahun 2013. Sumber: <https://www.mongabay.co.id/2013/12/27/balikpapan-program-penghijauan-terkendala-jumlah-lahan-terbatas/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2020, Pukul 15.00 WIB.

kota, yaitu kawasan Telagasari dan hutan lindung Pertamina. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang informan, bahwa banyak pemukim ilegal yang telah masuk ke kawasan hutan Pertamina dan mulai membangun rumah permanen (Wawancara dengan Humas Pertamina RU V Balikpapan, 10 September 2011). Selain itu dikawasan hutan lindung kota Telagasari berdasarkan pantauan penulis mulai bermunculan banyak rumah dan penambangan pasir kuarsa ilegal yang seharusnya tidak diperbolehkan di dalam hutan lindung. Balikpapan juga rawan dalam mengatasi air bersih, karena pasokan air bersih bagi masyarakat kota ini berasal dari waduk dan bendungan, peningkatan jumlah waduk atau jumlah produksi air bersih yang tidak sebanding dengan jumlah peningkatan penduduk Balikpapan menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata di masa yang akan datang.

Kesimpulan

Fenomena yang terjadi di Balikpapan merupakan potret atau representasi dari pembangunan di Indonesia, dimana distribusi pembangunan tidak merata, hanya berpusat di beberapa kota besar. Akibat tidak adanya pemerataan pembangunan ini maka terjadi arus migrasi yang terus meningkat ke kota Balikpapan. Pemerintah kota Balikpapan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi jumlah pendatang yang berdatangan ke kota Balikpapan, namun menurut kebijakan yang dilakukan pemkot Balikpapan seperti razia KTP dan mewajibkan para pendatang untuk membayar uang jaminan merupakan solusi jangka pendek. Karena untuk mengurus masalah

migrasi ini dibutuhkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk membuat pusat-pusat ekonomi yang merata, sehingga warga tidak perlu pergi jauh untuk mencari penghidupan yang lebih baik.

Konflik jarang terjadi, karena proses kegiatan perekonomian di Balikpapan memiliki akar historis yang kuat dari kedatangan buruh minyak yang bekerja di sektor industri. Industri yang sangat jarang bersinggungan dengan konflik kepemilikan lahan. Penilaian upah setelah proklamasi kemerdekaan tidak lagi berdasarkan etnis, tetapi kepada kompetensi keahlian dan pendidikan, sehingga semua etnis yang ada di Balikpapan dapat melakukan mobilitas vertikal asal memiliki kompetensi keahlian yang dibutuhkan. Selain itu fenomena yang menarik ialah kemunculan organisasi masyarakat (Ormas) yang mengambil identitas “budaya asli”, padahal telah diketahui bahwa Balikpapan merupakan kota yang dibentuk oleh penduduk yang melakukan migrasi untuk menikmati gula-gula ekonomi dari wilayah sekitarnya.

Daftar Pustaka

- Anwar Sotoen, *Dari Swapraja ke Kabupaten Kutai*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979.
- Bemmelen, Sita Van dan Remco Raben. (ed) *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.
- Bappeda. *Balikpapan Dalam Angka 2012*. Balikpapan: Bappeda, 2012.
- Boomgaard, Peter Freek Colombijn, David Henley. (ed). *Paper Landscapes: Explorations in The Environmental History of Indonesia*. Leiden: KITLV Press, 1997. [Verhandelingen KITLV 178]
- Departement van Economisch Zaken, *Indisch Verslag 1936: Statistisch Jaaroverzicht Van Nederlandsh-Indië Over Het Jaar 1935*. Batavia: Landsdrukkerij, 1937.
- Geographical Review, Vol. 76, No. 2, Thematic Issue: Asian Urbanization April, 1986.
- Humas Kota Balikpapan, *90 Tahun Kota Balikpapan*. Balikpapan: Pemerintah Kota Balikpapan, 1987.
- James Davidson, David Hanley, Sandra Moniaga (ed). *Adat Dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor, 2010.
- Klinken, Gerry Van. Terj. Bernard Hidayat. *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007
- Knappen, Han. *Forest of Fortune?: The Environmental History of Southeast Borneo, 1600 – 1880*. Leiden: KITLV Press, 2001. [Verhandelingen KITLV 189]
- Lapian, Adrian B. *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2009.
- Li, Tania Murray, *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2002.
- Lindblad, J. Thomas. *Between Dayak and The Dutch: The Economic History in Southeast Kalimantan 1880 – 1942*. Dordrecht: Foris, 1988. [Verhandelingen KITLV 134]
- Magenda, Burhan. *East Kalimantan: The Decline of Commercial Aristocracy*. Ithaca, Newyork: Cornell University Modern Indonesia Project, 1991.
- Monografi Kota Balikpapan Tahun 1981.

- Noor, Mooh. dkk. *Cerita Rakyat Daerah Kalimantan Timur*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1981.
- Nas, Peter J.M. *The Indonesian City: Studies in Urban Development and Planning*. Dordrecht: Floris Publication, 1986. [Verhandelingen KITLV 117]
- Peluso, Nancy L. *Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumber Daya dan Perlawanan di Jawa*. Jakarta: Konphalindo, 2006.
- Pemprov Kalimantan Timur, *Kalimantan Timur in Figures 2009*. Samarinda: Pemprov Kalimantan Timur, 2010.
- Pemkot Balikpapan. *Pendapatan Regional Kota Balikpapan 1984 – 1988*. Balikpapan: Pemkot Balikpapan. 1989.
- Pratama, Akhmad Ryan. *Industri Minyak Balikpapan Dalam Dinamika Kepentingan Sejak Pendirian Hingga Proses Nasionalisasi*. Malang: Penerbit Univ Neg Malang, 2012.
- Thee Kian Wie, *The Asia-Pacific Century Historical Perspective*. Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Wadley, Reed L. (ed) *Histories of The Borneo Environment: Economic, Political and Social Dimensions of Change and Continuity*. Leiden: KITLV Press, 2005. [Verhandelingen KITLV 231]
- Zimmermann, Gerd R. *Kalimantan Timur: Petunjuk Statistik 1980*. Tempat Terbit, Penerbit dan Tahun Terbit Tidak Diketahui. [Proyek Pembangunan Daerah Transmigrasi Kalimantan Timur]